



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR

P U T U S A N Nomor 20-K/PM III-16/AD/II/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Ahmar, S.E
Pangkat/NRP	: Lettu Arh/ 21960145710875
Jabatan	: Dantim Intel
Kesatuan	: Korem 143/HO
Tempat, tanggal lahir	: Katoi, 12 Agustus 1975
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asmil Korem 143/HO.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR tersebut di atas;

Membaca : 1. Berkas Perkara Penyidikan dari Denpom XIV/3 Nomor: BP-19/A-16/XII/2019 tanggal 17 Desember 2019

2. Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Otmil IV-17 Makassar Nomor: R/14/II/2020 tanggal 11 Februari 2020.

Memperhatikan: 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 143/HO selaku Papera Nomor: Kep/3/II/2020 tanggal 24 Januari 2020.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor: Sdak/13/II/2020 tanggal 10 Februari 2020.

3. Penetapan Kadilmil III-16 Makassar Nomor TAP-20 K/PM III-16/AD/II/2020 tanggal 14 Februari 2020 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid TAP/20-K/PM III-16/AD/II/2020 tanggal 14 Februari 2020 tentang Hari Sidang.

5. Penetapan Panitera Nomor TAP/20-K/PM III-16/AD/II/2020 tanggal 14 Februari 2020 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

Hal 1 dari 19 Put. No. 20-K/PM III-16/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar : 1. Penjelasan dari Oditur Militer didepan persidangan sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan hukum yang berlaku yaitu sejak pelaksanaan sidang hari pertama sampai dengan sidang lanjutan pada hari ini tetap Terdakwa tidak hadir karena sejak semula berkas perkara Terdakwa dilimpahkan dan diregister di Pengadilan Militer III-16 Makassar Terdakwa masih belum kembali ke kesatuannya, Dimana persidangan yang berlangsung pada:

- 1) Hari Selasa, tanggal 25 Februari 2020.
- 2) Hari Senin, tanggal 09 Maret 2020.
- 3) Hari Senin, tanggal 23 Maret 2020.

b. Bahwa Oditur Militer juga sudah tidak menjamin lagi akan dapat menghadirkan Terdakwa di persidangan.

c. Bahwa berdasarkan surat jawaban terakhir dari Kesatuan Terdakwa yang ditandatangani oleh Komandan Korem 143/HO Nomor: B/268/III/2020 tanggal 20 Maret 2020 tentang Jawaban Panggilan Lettu Arh Ahmar, S.E. NRP 21960145710875. Yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan dikarenakan yang bersangkutan hingga saat ini masih Desersi dan belum kembali ke kesatuan.

2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/13/II/2020 tanggal 10 Februari 2020 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

3. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan.

Memperhatikan: 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Desersi dalam waktu damai”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Hal 2 dari 19 Put. No. 20-K/PM III-16/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

- 1) Pidana Pokok : 1 (satu) tahun penjara
- 2) Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer c.q. TNI AD.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- 6 (enam) lembar absensi dari Tim Intel Korem 143/HO bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2019 yang ditandatangani oleh Plh. Komandan Tim Intelrem 143/HO atas nama Lettu Inf Laode Hanafi NRP 542704.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan undang-undang dan terakhir sesuai Relas Panggilan Sidang dari Komandan Korem 143/HO Nomor: B/268/III/2020 tanggal 20 Maret 2020 tentang Jawaban Panggilan Lettu Arh Ahmar, S.E. NRP 21960145710875. Yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan dikarenakan yang bersangkutan hingga saat ini masih Desersi dan belum kembali ke kesatuan. .

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku, yaitu sebagai berikut:

1. Berdasarkan Surat Panggilan dari Kaotmil IV-17 Makassar Nomor: B/87/II/2020 tanggal 19 Februari 2020;
2. Berdasarkan Surat Panggilan dari Kaotmil IV-17 Makassar Nomor: B/101/II/2020 tanggal 26 Februari 2020; dan
3. Berdasarkan Surat Panggilan dari Kaotmil IV-17 Makassar Nomor: B/118/III/2020 tanggal 10 Maret 2020.

Menimbang : Bahwa sebelumnya Majelis akan memberikan pendapatnya mengenai batasan lamanya tindak pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo. ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut:

Bahwa penghitungan waktu Terdakwa melakukan Tindak Pidana meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan terhenti sejak perkara Terdakwa dilaporkan oleh

Hal 3 dari 19 Put. No. 20-K/PM III-16/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesatuannya ke Denpom XIV/3, berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP-18/A-15/XII/2019/Idik tanggal 09 Desember 2019 dan sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor: Sdak/13/II/2020 tanggal 10 Februari 2020. Selain itu Komandan Satuan melaporkan suatu perbuatan tindak pidana apa yang terjadi dan bukan yang akan terjadi.

Menimbang : Bahwa setelah mendengar penjelasan dari Oditur Militer tentang keberadaan Terdakwa tersebut di atas, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan pendapatnya bahwa oleh karena Terdakwa telah 3 (tiga) kali dipanggil oleh Oditur Militer untuk menghadap dipersidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi Terdakwa tetap tidak hadir dipersidangan dan Oditur Militer maupun pihak Kesatuan Terdakwa tidak lagi menjamin untuk dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan dikarenakan yang bersangkutan sudah tidak berada lagi di kesatuannya dan sudah tidak diketahui lagi alamatnya sesuai surat balasan dari kesatuan Terdakwa yang ditandatangani oleh Relas Panggilan Sidang dari Komandan Korem 143/HO Nomor: B/268/III/2020 tanggal 20 Maret 2020 tentang Jawaban Panggilan Lettu Arh Ahmar, S.E. NRP 21960145710875. Yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan dikarenakan yang bersangkutan hingga saat ini masih Desersi dan belum kembali ke kesatuan.

Maka oleh karena itu terhadap perkara desersi dalam upaya penyelesaian perkara dengan cepat dan demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan, maka pemeriksaan secara *inabsensia* atas perkara Terdakwa telah memenuhi persyaratan dan dapat dimulai yang pada akhirnya akan diputus tanpa hadirnya Terdakwa dengan dasar pertimbangan telah memenuhi ketentuan Pasal 141 ayat (10) jo Pasal 143 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, termasuk dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak ditemukan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, yang menyatakan bahwa perkara tindak pidana desersi yang Terdakwa melarikan diri, baik melarikan diri sejak awal ataupun setelah perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan Militer, dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut sejak pelimpahan berkas perkaranya ke Pengadilan, serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah tetapi Terdakwa tidak hadir disidang tanpa alasan, maka perkaranya dapat diperiksa secara *inabsensia* (tanpa hadirnya Terdakwa).

Hal 4 dari 19 Put. No. 20-K/PM III-16/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa guna terpenuhinya ketentuan dalam hukum acara mengenai perhitungan waktu 6 (enam) bulan berturut-turut sejak pelimpahan berkas perkaranya ke Pengadilan, maka Majelis memandang perlu lebih dahulu untuk menilai apakah perkara ini memenuhi syarat untuk disidangkan secara inabsensia atau tidak dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Menurut UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 2 ayat (4) menyebutkan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Mendasari ketentuan itu, terutama jika Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri, Majelis Hakim juga perlu mengemukakan pendapatnya bahwasanya dihadapkan dengan ketentuan dalam penjelasan Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 maka sejatinya seorang Hakim bukanlah hanya sebatas sebagai mulut atau corong dari undang-undang belaka begitu pula dengan para aparat penegak hukum lainnya seyogianya harus menjadi mulut kebenaran dan keadilan dengan memperhatikan bahwa setiap perkara memiliki sebab-sebab, karakter dan wujud yang berbeda-beda, dimana hakim dan penegak hukum lainnya bukan sekedar untuk mempertahankan hukum semata, bahwa hak atas keadilan bukan saja milik Terdakwa melainkan juga dimiliki oleh instansi atau tempat kesatuan Terdakwa bertugas yang segera menginginkan adanya kepastian hukum terhadap penyelesaian perkara anggotanya yang berlarut-larut karena melakukan tindak pidana desersi dan tidak kembali hingga dengan sekarang.

Menimbang : Bahwa sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 ditegaskan pula bahwasannya Pengadilan Militer adalah merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara, sehingga demi kepastian hukum dalam rangka penyelesaian berkas perkara Terdakwa, maka selanjutnya persidangan perkara Terdakwa secara inabsensia dinilai sudah tepat untuk dilaksanakan dimana hal ini sekaligus sebagai langkah positif dalam percepatan penyelesaian perkara desersi di lingkungan TNI sebagaimana sesuai azas peradilan yaitu cepat, sederhana dan biaya ringan.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup lagi menghadirkan Terdakwa meskipun meskipun telah dipanggil secara sah sebanyak 3 (tiga) kali dan terakhir sesuai Relas panggilan sidang dari Relas Panggilan Sidang dari Komandan Korem 143/HO Nomor: B/268/III/2020 tanggal 20 Maret 2020 tentang Jawaban Panggilan Lettu Arh Ahmar, S.E. NRP 21960145710875. Yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan

Hal 5 dari 19 Put. No. 20-K/PM III-16/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan dikarenakan yang bersangkutan hingga saat ini masih Desersi dan belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Majelis berpendapat perkara ini telah memenuhi syarat untuk diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara *inabsensia*). Dalam hal ini Majelis menyatakan dalam memeriksa dan memutus perkara Terdakwa Lettu Arh Ahmar, S.E. NRP 21960145710875, dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa (secara *inabsensia*) dikarenakan Terdakwa sejak semula melarikan diri.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/13/II/2020 tanggal 10 Februari 2020 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu dan di tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal empat bulan November tahun 2000 sembilan belas sampai dengan tanggal sembilan bulan Desember tahun 2000 sembilan belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019 di Markas Korem 143/HO, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana:

“Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1996 melalui Pendidikan Secaba, lulus dilantik pangkat Serda selanjutnya pada tahun 2014 mengikuti Pendidikan Secapa Reg lulus dan dilantik dengan pangkat Letda dan pada tahun yang sama mengikuti Sussarcab Arh dan setelah selesai ditempatkan di Yon Arhanudse 16/Maleo, kemudian pada tahun 2016 dipindahkan ke Korem 143/HO sampai sekarang dengan pangkat Lettu Arh, NRP 21960145710875.
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danrem 143/HO atau Atasan lain yang berwenang pada tanggal 4 November 2019.
3. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin setelah Terdakwa mendapat perintah dari Danrem 143/HO untuk melaksanakan BP dan orientasi tugas di Rindam XIV/Hsn dan ketika dilaksanakan Corps Raport di Rindam XIV/Hsn Terdakwa tidak hadir dan selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin Terdakwa tidak pernah menghubungi ke kesatuan maupun anggota Korem 143/HO untuk memberitahukan keberadaannya.

Hal 6 dari 19 Put. No. 20-K/PM III-16/AD/II/2020



4. Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang meninggalkan kesatuan tanpa ijin selanjutnya dari pihak kesatuan melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke tempat-tempat yang diduga didatangi dan disinggahi oleh Terdakwa, namun Terdakwa tidak dapat diketemukan sehingga dari kesatuan melimpahkan perkaranya ke Denpom XIV/3 Kendari untuk diproses perkaranya sesuai Laporan Polisi dari Denpom XIV/3 Kendari Nomor: LP-18/A-15/XII/2019/Idik tanggal 09 Desember 2019.

5. Bahwa Terdakwa pada saat meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah, Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman dan damai dan Kesatuan Korem 143/HO tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

6. Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danrem 143/HO atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 4 November 2019 sampai dengan perkaranya dilimpahkan ke Denpom XIV/3 Kendari tanggal 9 Desember 2019 atau selama 36 (tiga puluh enam) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga) puluh hari.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo. ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan apabila saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan disidang.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan, keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : Agung Nawang Kusuma
Pangkat/NRP : Sertu/21130103890593
Jabatan : Bamin Tim Intel
Kesatuan : Korem 143/HO
Tempat tanggal lahir : Blora, 18 Mei 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Korem 143/HO

Hal 7 dari 19 Put. No. 20-K/PM III-16/AD/II/2020



Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal Tersangka sejak bulan Juni 2017 di Korem 143/HO dalam hubungan atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Saksi mengetahui Tersangka meninggalkan kesatuan tanpa ijin/Desersi dari laporan tembusan surat Danrindam XIV/Hsn Nomor B/1064/X/2019 tanggal 31 Oktober 2019 tentang laporan personel belum Korps Raport a.n. Lettu Arh Ahmar, S.E (Tersangka).
3. Bahwa Saksi mengetahui Tersangka meninggalkan kesatuan setelah mendapat perintah dari Danrem 143/HO untuk melaksanakan BP dan orientasi tugas di Rindam XIV/Hsn namun pada saat akan melaksanakan acara Corps Raport di Rindam XIV/Hsn Tersangka tidak hadir sehingga dari kesatuan memerintahkan Kasi Intel dan anggota Intel Korem 143/HO untuk mencari keberadaan Tersangka di tempat yang biasa disinggahi/didatangi Tersangka namun Tersangka tidak ditemukan.
4. Bahwa Saksi mengetahui bahwa Tersangka telah berkeluarga dan mempunyai 2 orang anak dan Tersangka sebelumnya tidak pernah melakukan pelanggaran atau tindak pidana.
5. Bahwa Saksi mengetahui Tersangka meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansatnya namun Saksi tidak mengetahui penyebab Tersangka meninggalkan kesatuan dan sampai sekarang Tersangka tidak pernah menghubungi kesatuan Korem 143/HO untuk memberitahukan keberadaannya.
6. Bahwa Saksi mengetahui Tersangka meninggalkan kesatuan tanpa izin tidak membawa barang atau inventaris Satuan dan Negara RI dalam keadaan aman serta kesatuan tidak disiapkan untuk tugas operasi/perang.

Saksi-2:

Nama lengkap : Abdul Karim
Pangkat, NRP : Lettu Inf, 630717
Jabatan : Pa. Analis Tim Intel
Kesatuan : Korem 143/HO
Tempat, tanggal lahir : Barru, 4 Januari 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Teplan Kota Kendari.

Hal 8 dari 19 Put. No. 20-K/PM III-16/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Tersangka sejak tahun 2017 di Korem 143/HO, namun tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Saksi mengetahui Tersangka meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansatnya/Desersi sejak hari Senin tanggal 4 November 2019 sampai dengan sekarang dan belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa Saksi mengetahui Tersangka meninggalkan kesatuan Korem 143/HO dari Surat Danrindam XIV/Hsn Nomor B/1064/X/2019 tanggal 31 Oktober 2019 mengenai Tersangka yang belum melaksanakan Corps Raport di Rindam XIV/Hsn dimana sebelumnya Tersangka mendapat perintah melaksanakan BP dan orientasi tugas di Korem XIV/HO dengan jabatan Patih Arh Gol. VII Timtih Rindam XIV/Hsn namun Tersangka tidak melaksanakan perintah tersebut.
4. Bahwa Saksi mengetahui kesatuan Korem 143/HO telah berupaya melakukan pencarian terhadap Tersangka namun Tersangka tidak ditemukan sehingga pada tanggal 3 Desember Tersangka dinyatakan melakukan tindak pidana Desersi.
5. Bahwa Saksi mengetahui selama Tersangka meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak pernah menghubungi kesatuan maupun anggota Korem 143/HO untuk memberitahukan keberadaannya karena Handphone Tersangka sudah tidak aktif.
6. Bahwa Saksi mengetahui pada saat Tersangka meninggalkan kesatuan tanpa ijin, tidak membawa barang inventaris negara maupun satuan dan situasi negara dalam keadaan damai dan kesatuan Korem 143/HO tidak sedang dalam keadaan siaga perang.

Menimbang : Bahwa keterangan Terdakwa dipersidangan tidak dibacakan karena memang sejak awal Terdakwa tidak pernah diperiksa saat di penyidikan dan menurut ketentuan Undang-undang dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan, telah cukup memeriksa Saksi yang ada dan pemberkasan perkaranya tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa sehingga surat panggilan dan berita acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf g jo Pasal 124 ayat (4) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan penjelasannya.

Hal 9 dari 19 Put. No. 20-K/PM III-16/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa surat-surat sebagai berikut:

- 6 (enam) lembar absensi dari Tim Intel Korem 143/HO bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2019 yang ditandatangani oleh Pih. Komandan Tim Intelrem 143/HO atas nama Lettu Inf Laode Hanafi NRP 542704.

Seluruhnya telah diperlihatkan dan dibaca di persidangan serta telah diterangkan mengenai isinya berupa keterangan Terdakwa tidak hadir di satuan tanpa keterangan sejak tanggal 04 November 2019 sampai dengan sekarang ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan setelah menghubungkannya dengan alat bukti lain berupa surat-surat sebagai petunjuk di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1996 melalui Pendidikan Secaba, lulus dilantik pangkat Serda selanjutnya pada tahun 2014 mengikuti Pendidikan Secapa Reg lulus dan dilantik dengan pangkat Letda dan pada tahun yang sama mengikuti Sussarcab Arh dan setelah selesai ditempatkan di Yon Arhanudse 16/Maleo, kemudian pada tahun 2016 dipindahkan ke Korem 143/HO sampai sekarang dengan pangkat Lettu Arh, NRP 21960145710875.
2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danrem 143/HO atau Atasan lain yang berwenang pada tanggal 4 November 2019.
3. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin setelah Terdakwa mendapat perintah dari Danrem 143/HO untuk melaksanakan BP dan orientasi tugas di Rindam XIV/Hsn dan ketika dilaksanakan Corps Raport di Rindam XIV/Hsn Terdakwa tidak hadir dan selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin Terdakwa tidak pernah menghubungi ke kesatuan maupun anggota Korem 143/HO untuk memberitahukan keberadaannya.
4. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa yang meninggalkan kesatuan tanpa ijin selanjutnya dari pihak kesatuan melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke tempat-tempat yang diduga didatangi dan disinggahi oleh Terdakwa, namun Terdakwa tidak dapat diketemukan sehingga dari kesatuan melimpahkan perkaranya ke Denpom XIV/3 Kendari untuk diproses perkaranya sesuai Berkas Perkara dari Denpom XIV/3 Kendari Nomor: LP-18/A-15/XII/2019/Idik tanggal 09 Desember 2019.

Hal 10 dari 19 Put. No. 20-K/PM III-16/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar Terdakwa pada saat meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah, Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman dan damai dan Kesatuan Korem 143/HO tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danrem 143/HO atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 4 November 2019 sampai dengan perkaranya dilimpahkan ke Denpom XIV/3 tanggal 9 Desember 2019 atau selama 36 (tiga puluh enam) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga) puluh hari.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya dengan pertimbangan bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang menyatakan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri, demikian juga mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah meneliti dan memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatannya.

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut di atas yang disusun dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

Unsur kesatu : Militer

Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin

Unsur ketiga : Dalam waktu damai

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : “ Militer ”.

Militer menurut pengertian dalam kamus bahasa Indonesia adalah angkatan bersenjata dari suatu negara dan segala sesuatu yang berhubungan dengan angkatan bersenjata. Padanan kata lainnya adalah tentara atau angkatan bersenjata. Militer biasanya terdiri atas para prajurit atau serdadu.

Bahwa kata Militer, berasal dari bahasa Yunani “Miles” yang menurut Kanter dan Sianturi (1981:26) berarti seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan keamanan negara.

Hal 11 dari 19 Put. No. 20-K/PM III-16/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengertian Militer secara formil dalam Pasal 46 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer bahwa Yang dimaksud dengan militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu dinas tersebut.

Menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang dimaksud dengan "militer" adalah kekuatan perang dari suatu negara.

Bahwa seorang militer ditandai dengan adanya : Pangkat, NRP, Jabatan dan kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti surat dan petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1996 melalui Pendidikan Secaba, lulus dilantik pangkat Serda selanjutnya pada tahun 2014 mengikuti Pendidikan Secapa Reg lulus dan dilantik dengan pangkat Letda dan pada tahun yang sama mengikuti Sussarcab Arh dan setelah selesai ditempatkan di Yon Arhanudse 16/Maleo, kemudian pada tahun 2016 dipindahkan ke Korem 143/HO sampai sekarang dengan pangkat Lettu Arh, NRP 21960145710875.
2. Bahwa benar sampai dengan terjadinya perkara ini Terdakwa belum pernah diberhentikan dari dinas TNI AD.
3. Bahwa benar para saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai prajurit TNI AD dengan pangkat Lettu Arh, NRP 21960145710875 di Kesatuan sama dengan para saksi di Korem 143/HO dan sampai dengan terjadi perbuatannya yang menjadi perkara ini masih tetap aktif sebagai prajurit TNI AD.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan istilah "karena salahnya" pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kekurangan waspadaan, keteledoraan atau kekhilafan yang tidak diniati oleh pelaku.

Hal 12 dari 19 Put. No. 20-K/PM III-16/AD/II/2020



Yang dimaksud dengan “dengan sengaja” menurut M.v.T (Memorie Van Toelichting) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel Pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggungjawabnya, kemudian apel siang yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tanggungjawabnya.

Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Menimbang : Bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang bersesuaiannya dengan fakta yang ada di dalam persidangan yaitu “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti surat dan petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danrem 143/HO atau Atasan lain yang berwenang pada tanggal 4 November 2019.
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin setelah Terdakwa mendapat perintah dari Danrem 143/HO untuk melaksanakan BP dan orientasi tugas di Rindam XIV/Hsn dan ketika dilaksanakan Corps Raport di Rindam XIV/Hsn Terdakwa tidak hadir dan selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin Terdakwa tidak pernah menghubungi ke kesatuan maupun anggota Korem 143/HO untuk memberitahukan keberadaannya.
3. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa yang meninggalkan kesatuan tanpa ijin selanjutnya dari pihak kesatuan melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke tempat-tempat yang diduga didatangi dan disinggahi oleh Terdakwa, namun Terdakwa tidak dapat diketemukan sehingga dari kesatuan melimpahkan perkaranya ke Denpom XIV/3 Kendari untuk diproses perkaranya sesuai

Hal 13 dari 19 Put. No. 20-K/PM III-16/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Polisi dari Denpom XIV/3 Kendari Nomor: LP-18/A-15/XII/2019/Idik tanggal 09 Desember 2019.

4. Bahwa benar Terdakwa tidak memenuhi aturan yang berlaku bagi militer mengenai prosedur perijinan dimana hal tersebut sepatutnya telah diketahui oleh seluruh prajurit.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga: "Dalam waktu damai" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud "dalam waktu damai" adalah menunjukan waktu atau masa dimana pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, keadaan Negara RI adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang sebagaimana yang diberlakukan oleh Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang ataupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer maupun perang

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti surat dan petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari kesatuan Terdakwa yaitu Korem 143/HO sejak 4 November 2019 sampai dengan perkaranya dilimpahkan ke Denpom XIV/3 tanggal 9 Desember 2019 atau selama 36 (tiga puluh enam hari secara berturut-turut, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang.

2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari kesatuan Terdakwa yaitu Korem 143/HO sejak 4 November 2019 sampai dengan perkaranya dilimpahkan ke Denpom XIV/3 tanggal 9 Desember 2019 atau selama 35 (tiga puluh enam) hari secara berturut-turut, Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-

Hal 14 dari 19 Put. No. 20-K/PM III-16/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut lebih dari waktu tiga puluh hari yaitu dalam masa damai.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti surat dan petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar waktu selama Terdakwa tidak hadir di kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal Korem 143/HO sejak 4 November 2019 sampai dengan perkaranya dilimpahkan ke Denpom XIV/3 tanggal 9 Desember 2019 atau selama 36 (tiga puluh enam) hari secara berturut-turut.
2. Bahwa benar waktu selama 36 (tiga puluh enam) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari, hal ini juga sudah menjadi pengetahuan umum kalau waktu selama 36 (tiga puluh enam) hari, adalah lebih lama dari tiga puluh hari.
3. Bahwa benar absensi Terdakwa di kesatuannya yang menyatakan dengan jelas bahwa Terdakwa sejak tanggal Korem 143/HO sejak 4 November 2019 sampai dengan perkaranya dilimpahkan ke Denpom XIV/3 tanggal 9 Desember 2019 atau selama 36 (tiga puluh enam) hari secara berturut-turut tidak menandatangani lembar absensi yang menandakan Terdakwa tidak hadir selama waktu tersebut, sebagaimana bukti surat 6 (enam) lembar absensi dari Tim Intel Korem 143/HO bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2019 yang ditandatangani oleh Plh. Komandan Tim Intelrem 143/HO atas nama Lettu Inf Laode Hanafi NRP 542704. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo. ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan

Hal 15 dari 19 Put. No. 20-K/PM III-16/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang : Bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang pada dasarnya merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu.

2. Bahwa hakekat perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak boleh terjadi di dalam kehidupan seorang prajurit TNI karena dapat merusak sendi-sendi disiplin di lingkungan prajurit yang mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku di lingkungan TNI serta mencerminkan seorang prajurit yang jauh dari sifat militansi dan dedikasi serta mental yang rendah. Oleh karena itu demi menjaga ketertiban dan penegakan hukum serta adanya kepastian hukum atas status Terdakwa dimana dalam kehidupan organisasi militer yang selalu dituntut harus disiplin, maka perbuatan Terdakwa yang sedemikian tersebut harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak mempengaruhi disiplin prajurit lainnya, karena Undang-Undang Hukum Pidana Militer sedemikian kerasnya menuntut setiap militer untuk tetap patuh dan taat kepada norma kehidupan disiplin militer tanpa syarat.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilakukan Terdakwa yang pada akhirnya dapat mengakibatkan terhambatnya pencapaian tugas pokok satuan.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena kurang menghayati Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI sebagai pedoman hidup bagi setiap prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa tujuan hukum yang tercermin melalui putusan Hakim tidak semata-mata mengejar kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, merupakan tujuan pula dari putusan, harus diupayakan keseimbangan antara ketiga tujuan hukum tersebut.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis dalam menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, semata-mata bukan sebagai balas

Hal 16 dari 19 Put. No. 20-K/PM III-16/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dendam atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa melainkan untuk menegakkan keadilan yang tergoyahkan akibat perbuatan Terdakwa, dan lebih dari itu bertujuan untuk menciptakan efek jera bagi Prajurit lain dalam tata pergaulan sebagai anggota militer, mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat terutama masyarakat militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa telah berdinis selama 24 (dua puluh empat) tahun).

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa merupakan pengingkaran terhadap Sumpah Prajurit dan Sapta Marga dimana Terdakwa sudah tidak lagi mempunyai jati diri sebagai seorang Prajurit TNI;
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer;
3. Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi prajurit yang lain khususnya di kesatuan Terdakwa dan prajurit lain pada umumnya; dan
4. Terdakwa sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa sudah tidak lagi ingin mengikatkan diri lagi dengan kedinasan militer, oleh karena itu demi menjaga ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya. Terdakwa lebih memilih untuk melarikan diri dan menjauhkan diri dari kewajiban dinasnya adalah sudah merupakan pengingkaran terhadap Sumpah Prajurit dan Sapta Marga dimana Terdakwa sudah tidak lagi mempunyai jati diri sebagai seorang prajurit TNI. Dari uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa sikap dan sifat yang melekat pada diri Terdakwa dan tindakannya dihubungkan dengan tata nilai yang berlaku dalam kehidupan prajurit menunjukkan bahwa pada diri Terdakwa telah nyata tidak terdapat lagi sikap dan sifat yang selayaknya dimiliki oleh seorang prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa Terdakwa sampai dengan sekarang tidak kembali ke kesatuan, hal ini menunjukkan Terdakwa sudah tidak ada keinginan lagi untuk tetap berdinis dalam TNI AD. Dari uraian tersebut di atas, menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah prajurit yang baik dan bertanggung-jawab, yang

Hal 17 dari 19 Put. No. 20-K/PM III-16/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mempunyai keinginan lagi untuk berdinasi di lingkungan militer. Prajurit yang demikian jika dipertahankan hanya akan membawa pengaruh yang buruk bagi pembinaan disiplin di kesatuan. Di samping itu dikawatirkan keberadaan Terdakwa dalam status sebagai prajurit TNI akan sangat mencemarkan nama baik dan akan mengganggu serta menggoyahkan sendi-sendi pembinaan disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit TNI. Dengan demikian Terdakwa dinilai tidak cukup layak untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan pidana Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim sependapat, karena sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa apabila sewaktu-waktu Terdakwa tertangkap atau menyerahkan diri sebelum masa untuk melaksanakan pidana daluwarsa Oditur Militer dapat melaksanakan eksekusi pelaksanaan pidana terhadap Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:
- 6 (enam) lembar absensi dari Tim Intel Korem 143/HO bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2019 yang ditandatangani oleh Plh. Komandan Tim Intelrem 143/HO atas nama Lettu Inf Laode Hanafi NRP 542704.

Seluruhnya berisikan keterangan Terdakwa tidak hadir di satuan tanpa keterangan sejak tanggal 4 November 2019 sampai dengan perkaranya dilimpahkan ke Denpom XIV/3 tanggal 9 Desember 2019 atau selama 36 (tiga puluh enam) hari secara berturut-turut. Majelis berpendapat bahwa surat-surat tersebut dari semula sebagai kelengkapan administratif yang melekat dalam berkas perkara. Oleh karena itu surat-surat tersebut harus tetap menyatu dan melekat dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo. ayat (2) KUHPM jo. Pasal 26 KUHPM jo. Pasal 143 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I :

Hal 18 dari 19 Put. No. 20-K/PM III-16/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **yaitu Ahmar, S.E, Lettu Arh NRP 21960145710875**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: **“Desersi dalam waktu damai”**.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - 6 (enam) lembar absensi dari Tim Intel Korem 143/HO bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2019 yang ditandatangani oleh Plh. Komandan Tim Intelrem 143/HO atas nama Lettu Inf Laode Hanafi NRP 542704.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 23 Maret 2020 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Fredy Ferdian Isnartanto, Letnan Kolonel Chk NRP 11010047011279 sebagai Hakim Ketua, serta Wahyudin, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 522532 dan Rahmansyah Fharuddin, S.H., M.H., Mayor Sus, NRP 534531 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer, Syahrul Nasution, S.H., Mayor Chk NRP 11050025371279, Panitera Pengganti, Erna Dwi Astuti, Pembantu Letnan Satu NRP 2190148301271 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua,

Fredy Ferdian Isnartanto, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11010047011279

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Wahyudin, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 522532

Rahmansyah Fharuddin, S.H., M.H.
Mayor Sus NRP 534531

Panitera Pengganti,

Erna Dwi Astuti
Peltu (K) NRP 21930148301271

Hal 19 dari 19 Put. No. 20-K/PM III-16/AD/II/2020